



PROSPEK EKONOMI DIGITAL BAGI PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Achmad Wirabrata*)

Abstrak

Kelompok negara G-20 berkomitmen untuk memantapkan ekonomi digital sebagai instrumen inovatif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi global, Pemerintah Indonesia memiliki misi jangka panjang menjadi The Digital Energy of Asia. Adapun potensi ekonomi digital di Indonesia dapat dilihat dari banyaknya transaksi menggunakan internet. Saat ini pengguna internet di Indonesia dalam 5 tahun terakhir terus meningkat di atas 12 persen. Meningkatnya perdagangan digital memberikan dampak yang baik bagi perekonomian. Untuk memaksimalkan potensi ekonomi digital, terdapat beberapa hambatan seperti permodalan, pajak, perlindungan konsumen, pembangunan infrastruktur, pengiriman logistik, dan sumber daya manusia. Pada tahun 2016 pemerintah mempersiapkan roadmap perdagangan digital untuk mengantisipasi hambatan tersebut serta meningkatkan daya saing. Peran DPR RI untuk mengawasi program pemerintah berjalan dan mendorong pemerintah menyusun aturan yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi digital.

Pendahuluan

Kelompok negara G-20 berkomitmen untuk memantapkan ekonomi digital sebagai salah satu bentuk instrumen inovatif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi global. Hal ini sejalan dengan tema dan kunci utama dalam penyelenggaraan KTT G-20 yaitu pertumbuhan inovatif.

Pemerintah memiliki misi jangka panjang menjadikan Indonesia menjadi *The Digital Energy of Asia*. Berkaitan dengan hal tersebut, setelah berkunjung ke industri berbasis digital, seperti kawasan industri Silicon Valley di California, Presiden Joko Widodo menginstruksikan 8 Kementerian untuk berkolaborasi membentuk *roadmap* perdagangan digital agar industri di

Indonesia tahun 2020 bisa mencapai 130 miliar dolar. Presiden juga mengingatkan masyarakat Indonesia untuk dapat melakukan revolusi industri berupa digital ekonomi yang saat ini telah berkembang di banyak negara.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I-2016 menunjukkan angka 4,92 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan 4-2015, yaitu sebesar 5,04 persen tetapi meningkat dibandingkan triwulan I tahun 2015, yaitu sebesar 4,71 persen. Namun, di tengah lambatnya pertumbuhan, perekonomian dipercaya masih akan mampu tumbuh secara optimal di periode yang akan datang mengingat

*) Peneliti Muda Kebijakan Publik pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: achmad.wirabrata@dpr.go.id



masih terdapat sektor potensial yang belum dikelola dengan baik.

Salah satu sektor yang dipercaya mampu menopang pertumbuhan ekonomi tersebut adalah ekonomi digital. Tapscott, seorang pakar ekonomi digital, (1998) menjelaskan ekonomi digital sebagai sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang memiliki ciri sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen informasi dan pemrosesan informasi, serta kapasitas komunikasi. Keberadaan ekonomi digital akan ditandai dengan semakin maraknya perkembangan bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antarperusahaan ataupun individu.

Ekonomi digital dipercaya akan mampu menjawab tantangan pembangunan perekonomian dalam negeri yang belum stabil. Bentuk ekonomi ini hadir dengan topografi yang landai, inklusif, dan memberikan banyak peluang di saat empat era ekonomi sebelumnya, yakni era masyarakat pertanian, era mesin pasca revolusi industri, era perburuan minyak, dan era kapitalisme korporasi multinasional, tidak mampu menjawab permasalahan yang ada.

Di dalam negeri, perkembangan ekonomi digital sudah tidak dapat diragukan lagi, terlebih di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan Makassar. Barang kebutuhan dasar yang semula hanya dapat diperdagangkan dalam transaksi konvensional, kini sudah dapat dilakukan dalam bentuk perdagangan digital. Indonesia telah memiliki perusahaan digital seperti Go-jek, Blibli, dan Traveloka yang terus berkembang. Masyarakat (konsumen) tidak perlu lagi memusingkan waktu dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan ketika membutuhkan sebuah barang.

Laporan yang dipublikasikan oleh McKinsey & Company (2015) menyebutkan bahwa perusahaan asal Indonesia merupakan kompetitor kuat jika dikaitkan dengan perdagangan digital. Indonesia merupakan pemain utama dalam perdagangan digital. Masih dari sumber yang sama, pertumbuhan perdagangannya diprediksi akan mampu tumbuh hingga 10 kali lipat dari situasi yang ada saat ini. Hal ini tentu menjadi portofolio yang

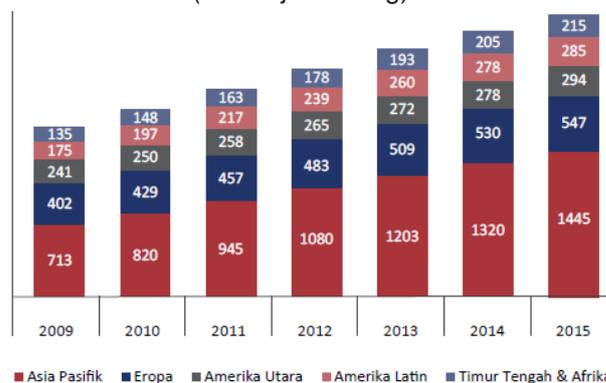
menjanjikan bagi Indonesia di mata investor asing.

Dalam memaksimalkan potensi ekonomi digital di Indonesia, pemerintah mengidentifikasi beberapa hambatan seperti permodalan, pajak, perlindungan konsumen, pembangunan infrastruktur, pengiriman logistik, dan sumber daya manusia sehingga diperlukan reformulasi kebijakan mengenai ekonomi digital.

Potensi dan Tantangan

Perkembangan ekonomi digital di dunia sedemikian pesat yang tergambar pada beberapa indikator. Nilai investasi dalam bidang telekomunikasi cukup tinggi dan dalam tren yang masih terus meningkat. OECD (2015) mencatat bahwa nilai investasi bidang telekomunikasi di dunia sejak tahun 2000 mencapai rata-rata 200 miliar dolar AS per tahun. Sejalan dengan hal tersebut, total sambungan telekomunikasi yang terdiri dari telepon analog, digital (ISDN dan DSL), modem, serat fiber, dan selular mencapai sekitar 2,1 miliar sambungan pada tahun 2013. Hal ini menandakan preferensi masyarakat dunia terhadap telepon selular semakin tinggi. Jumlah pengguna internet mengalami peningkatan terutama di Asia. Pada tahun 2009 pengguna internet di Asia berjumlah 713 juta orang, di tahun 2015 meningkat lebih dari 200 persen yaitu 1.445 juta orang. Data pengguna internet bisa dilihat pada Diagram 1 berikut ini.

Diagram 1. Jumlah Pengguna Internet (dalam juta orang)



Sumber: Emarketer

Dilihat dari segi konsumen, Indonesia juga merupakan pasar yang sangat potensial. Sebagai negara dengan jumlah populasi terbanyak ke-4 di dunia, kekuatan pasar domestik tentu tidak dapat dipandang

sebelah mata. Terlebih, pendapatan per kapita yang dimiliki masyarakat Indonesia menunjukkan tren yang selalu positif meningkat sejak tahun 2006. Industri digital tentu akan semakin bergairah dengan kondisi ini.

Pertumbuhan kelas menengah serta penetrasi internet juga tidak dapat dikesampingkan. Bank Dunia mencatat bahwa Indonesia telah mengalami pertumbuhan kelas menengah yang begitu fantastis sejak krisis moneter tahun 1998. Pertumbuhan kelas menengah ini diprediksi akan terus meningkat hingga tahun 2030 dengan populasi sebanyak 141 juta jiwa.

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, potensi ekonomi digital juga tidak terlepas dari penetrasi internet yang ada saat ini. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa pada tahun 2014, jumlah pengguna internet di dalam negeri sudah sebanyak 88.1 juta jiwa dengan penetrasi sebesar 34,9 persen, meningkat sekitar 16 persen dari tahun 2013 sebesar 71,2 juta jiwa dengan penetrasi sebesar 28,6 persen. Angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan majunya teknologi di Indonesia. Litbang Kompas memprediksi bahwa angka tersebut akan terus meningkat dan di tahun 2017 jumlahnya akan sebanyak 117 juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar yang sangat potensial bagi para pedagang atau pelaku bisnis perdagangan digital.

Potensi yang besar ini tentu tidak akan mampu digunakan secara optimal apabila para pemangku kepentingan tidak mengantisipasi masalah yang akan datang mengiringi. Salah satu masalah yang cukup berpotensi adalah hilangnya potensi pajak dan kekosongan hukum yang mengatur proses transaksi perdagangan secara digital.

Pusat Studi Prakarsa memperkirakan bahwa potensi pajak yang bisa digali dari industri ini bisa mencapai 10-15 triliun rupiah per tahunnya. Angka ini tentu bukanlah nominal yang sedikit. Direktur Jenderal Pajak dalam Surat Edaran Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Dagang menyatakan bahwa tidak ada pajak baru pada transaksi e-Dagang sehingga berlaku ketentuan umum dan tidak ada perbedaan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan antara

transaksi konvensional dan elektronik. Ini tentu menyebabkan pemerintah akan kehilangan potensi penerimaan negara. Untuk itu penting rasanya bagi pemerintah untuk melakukan inovasi terkait pemungutan pajak yang baru dan lebih aplikatif untuk transaksi digital.

Masalah kekosongan regulasi juga patut menjadi perhatian bersama. Masih jelas dalam ingatan pada bulan Maret 2016 lalu telah terjadi aksi unjuk rasa para supir taksi konvensional atas kehadiran taksi *online*. Banyak yang beranggapan bahwa taksi online merusak tatanan ekonomi yang sudah ada, namun tidak sedikit pula yang merasa diuntungkan dengan kehadiran taksi *online*. Perdebatan ini tentu dapat diselesaikan dengan kehadiran sebuah regulasi.

Di satu sisi, penerapan teknologi digital meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Di sisi lain, cara berbisnis secara konvensional pada umumnya menyerap tenaga kerja lebih banyak. Penerapan teknologi digital berpotensi menggantikan bisnis konvensional sehingga dapat mengurangi penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini diperlukan kebijakan Pemerintah untuk memastikan perkembangan ekonomi digital berdampak positif pada perekonomian secara keseluruhan.

Upaya Yang Perlu Dilakukan Pemerintah

Presiden Joko Widodo meminta semua pemangku kepentingan untuk mengejar perkembangan karena Indonesia memiliki modal dasar yang kuat untuk mengembangkan ekonomi digital. Untuk mengejar ketertinggalan, Pemerintah menjalin kerja sama dengan perusahaan perdagangan digital besar dari Tiongkok, Alibaba Corporation Group untuk memasarkan produk Indonesia. Produk Indonesia diharapkan dikenal dan mendapatkan pasar yang lebih luas sehingga dapat berkembang. Untuk pengembangan awal, Pemerintah mendorong program seribu *startup*, sebagai usaha rintisan digital yang dapat menghasilkan 10 miliar dolar dalam 5 tahun ke depan. Pemerintah juga menargetkan 8 juta UMKM dapat terhubung dengan jaringan dagang Alibaba Corporation Group pada tahun 2020.

Bank Indonesia melaporkan nilai transaksi perdagangan digital di Indonesia tahun 2014 mencapai 2,6 miliar dolar Amerika dan meningkat tahun 2015 menjadi 3,56 miliar dolar Amerika. Diprediksi pada tahun 2016 ini akan melebihi 4,89 miliar dolar. Tingginya perputaran uang yang terjadi dalam proses perdagangan digital mengharuskan Pemerintah menyiapkan aturan yang memperkuat penggunaan sistem digital, aturan keamanan *cyber*, serta keamanan data dan internet yang lebih aman.

Ekonomi digital memberikan dampak pada masalah keamanan, privasi, dan perlindungan konsumen. Pemerintah menyiapkan *roadmap* perdagangan digital untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi digital dengan penekanan pada 7 isu strategis yaitu logistik, pendanaan, perlindungan konsumen, infrastruktur komunikasi, pajak, pendidikan dan sumber daya manusia, *cyber security*. Dengan disusunnya *roadmap* ini, diharapkan dapat mempercepat perkembangan perdagangan digital yang memiliki daya saing.

Penutup

Dalam menghadapi persaingan di era globalisasi ini, banyak negara meningkatkan perekonomian melalui ekonomi digital. Presiden Joko Widodo mendukung ekonomi digital dengan menetapkan Indonesia sebagai *The Digital Energy of Asia*. Indonesia memiliki potensi tingginya jumlah penduduk, terus meningkatnya jumlah pengguna internet, serta sumber daya yang melimpah. Masih terdapat beberapa potensi yang dapat menjadi penghambat percepatan pelaksanaan ekonomi digital, yaitu belum tersedia peraturan yang secara spesifik mengatur perdagangan digital, masih rendahnya infrastruktur komunikasi dan internet, serta masih terdapat perbedaan teknologi yang signifikan antara kota dan desa. Pajak yang dihasilkan dari perdagangan digital dinilai sangat signifikan, namun belum ada aturan yang jelas, sehingga dapat mengurangi penerimaan untuk negara.

Peran DPR RI sesuai fungsi pengawasan sangat penting mengawal perkembangan program digital ekonomi yang sedang berjalan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pemerintah diharapkan dapat mempercepat penyusunan aturan pelaksanaan yang mendukung program digital ekonomi serta aturan pajak.

Referensi

- Gryseels, Michael est (2015), "Sepuluh Gagasan untuk Memaksimalkan Dampak Sosio-Ekonomi TIK di Indonesia", McKinsey & Company, Indonesia.
- "Tantangan, Arah Kebijakan dan Prospek Perekonomian Indonesia", Bank Indonesia, 2016.
- "Ekonomi Digital, Indonesia Memiliki Modal Dasar unntuk mengembangkan.", *Kompas*, 7 September 2016.
- "Ekonomi Digital Jadi Perhatian Utama Pertemuan", <http://surabaya.bisnis.com/read/20160901/95/90956/ekonomi-digital-jadi-perhatian-utama-pertemuan-g20>, diakses 5 September 2016.
- "Indonesia Akan Jadi Pemain Ekonomi Digital Terbesar di Asia.", https://kominform.go.id/index.php/content/detail/6441/Indonesia+Akan+Jadi+Pemain+Ekonomi+Digital+Terbesar+di+Asia+Tenggara/o/berita_satker, diakses 6 September 2016.
- "Jokowi di KTT G20 Hindari Kebijakan Ekonomi yang Menciptakan Dampak Negatif", <http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3291039/jokowi-di-ktt-g20-hindari-kebijakan-ekonomi-yang-menciptakan-dampak-negatif>, diakses 6 September 2016. "Perdagangan, Layanan Digital Jadi Langganan", *Kompas*, 7 September 2016.
- "Mencermati Ekonomi Digital di Indonesia.", <http://www.theindonesianinstitute.com/mencermati-ekonomi-digital-di-indonesia/>, diakses 6 September 2016.
- "Perdagangan Online, RI Siap Undang Investor Sukseskan E-Commerce." *Neraca*. 7 September 2016.
- "Potensi Besar Indonesia di Era Pertumbuhan Ekonomi Digital.", <http://www.ui.ac.id/berita/potensi-besar-indonesia-di-era-pertumbuhan-ekonomi-digital.html>, diakses 6 September 2016.